PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

NOMOR 512 TAHUN 2026

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1010 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan pemutakhiran daftar informasi publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

b. bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan adanya perubahan atas daftar informasi publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada berbagai layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1010 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU ...

KESATU : Substansi dalam berbagai layanan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2026
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DANANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 512 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1010 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Profil singkat tentang organisasi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	√	Permanen

2.	Tugas dan Fungsi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	√	Selama berlaku
3.	Struktur Organisasi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	√	-	√	Selama berlaku
4.	Informasi Mengenai Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2025	√	-	√	Selama berlaku
5.	Visi dan Misi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Permanen
6.	Tata Cara Permohonan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
7.	Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku
8.	Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku
9.	Formulir Permohonan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
10.	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
11.	Daftar Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
12.	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku

f 9

13.	Ringkasan Layanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Tahunan	-	-	√	1 tahun
14.	Peraturan Standar Layanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku
15.	Rencana Strategis PPATK	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2019	-	-	√	Selama berlaku
16.	Informasi Serta Merta	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, berkala	-	-	√	Selama berlaku

Lingkup Bidang Umum

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Dokumen Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
2.	Berita Acara Aanwijzing	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
3.	Keputusan Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
4.	Laporan Pengadaan Barang/jasa	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun

5.	Piagam Penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
6.	Laporan Kuasa Pengguna (Barang Milik Negara Tahun 2023)	Biro Umum (Cq.BMN PPATK)	Biro Umum (Cq.BMN PPATK)	Jakarta, 2023	√	√	√	10 tahun
7.	Laporan Pengguna (Barang Milik Negara Tahun 2023)	Biro Umum (Cq.BMN PPATK)	Biro Umum (Cq.BMN PPATK)	Jakarta, 2023	√	√	√	10 tahun
8.	Laporan Tahunan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Tahunan	√	-	√	Permanen
9.	Laporan Semester	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Semesteran	√	-	√	Permanen
10	Dokumen Siaran Pers	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	-	-	√	5 tahun
11	Dokumen Berita	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	-	-	√	5 tahun
12	Laporan Layanan Informasi Publik	Biro Umum	PPID	Jakarta, Tahunan	-	-	√	5 tahun
13.	Statistik Layanan Informasi Publik	Biro Umum	PPID	Jakarta, Tahunan	-	-	√	5 tahun

14.	Piagam Penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen

Lingkup Perencanaan dan Keuangan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
2.	Rencana Strategis	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2019	√	-	√	Permanen
3.	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	-	-	√	5 tahun
4.	Kamus IKU	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2019	-	-	√	Permanen
5.	Laporan Kinerja PPATK	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen

6.	Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun
7.	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
8.	Rencana Aksi Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun

Lingkup Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Proses Penerimaan Aparatur Sipil Negara meliputi: Pengumuman, Pemanggilan Peserta Test, dan Pengumuman Kelulusan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta	-	-	√	1 tahun setelah pengangkatan
2.	Proses Seleksi JPT/Administrator: Pengumuman, Pemanggilan Peserta Test,	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta	-	-	√	1 tahun setelah pengangkatan

	dan Pengumuman Kelulusan							
3.	Dokumen Penghargaan yang Diterima oleh PPATK di bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta	-	-	√	2 tahun
4.	Bagan Struktur Organisasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Perubahan, Jakarta	-	-	√	Setelah perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan
5.	Tugas dan Fungsi Organisasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta	-	-	√	Setelah perubahan tugas dan fungsi Ortaker Ditetapkan

Lingkup Inspektorat

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	

1.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Pegawai (*whistleblowing system*)	Inspektorat	Inspektorat	Jakarta, setiap saat	-	-	√	Selama masih berlaku
2	Ikhtisar hasil pemeriksaan auditor eksternal semesteran	Inspektorat	Inspektorat	Jakarta, setiap saat	√	-	-	5 tahun setelah UU Pertanggungjawaban APBN disahkan
3	Dokumen terkait Sosialisasi dan edukasi pengendalian gratifikasi	Inspektorat	Inspektorat	Jakarta, setiap saat	√	-	√	Selama masih berlaku

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Aplikasi Publik yang Telah Dikembangkan	PTI	PTI	Tahunan, Jakarta	-	-	√	5 tahun setelah diperbarui

2.	User Manual Aplikasi Publik	PTI	PTI	Per aplikasi, Jakarta	-	-	√	5 tahun setelah diperbarui
3.	Rekapitulasi Layanan TI untuk Publik	PTI	PTI	Tahunan, Jakarta	-	-	√	7 tahun

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Jadwal Diklat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	1 tahun
2.	Katalog Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	2 tahun
3.	Maklumat Pelayanan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
4.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Semesteran, Depok	-	-	√	2 tahun

5.	Laporan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Semesteran, Depok	-	-	√	2 tahun
6.	Dokumen Perencanaan Zona Integritas	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
7.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
8.	Statistik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
9.	Laporan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Layanan Kerja Sama dan Pendidikan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
10.	Dokumen Standar Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Pelatihan APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
11.	Dokumen Kebijakan Jam Pelayanan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan Depok	-	-	√	Selama berlaku
12.	Rencana Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat APUPPTP	Pusdiklat APUPPT	Tahunan Depok	-	-	√	Selama berlaku
13.	Laporan Kinerja di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan Depok	-	-	√	Selama berlaku

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Nota Kesepahaman Dengan FIU Luar Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2023	-	-	√	Selama masih berlaku
2.	Dokumen Hasil Mutual Evaluation Indonesia	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2023	√	-	√	Selama masih berlaku
3	Dokumen Kajian Internasional bersama Organisasi Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2025	√	-	√	Selama masih berlaku

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	

1.	Hasil Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU dan TPPT	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, setiap 5 tahun	√	-	√	Selama masih berlaku
2.	Hasil Penilaian Risiko Sektoral terhadap TPPU dan TPPT	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, setiap tahun	√	-	√	Selama masih berlaku
3.	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2025	-	-	√	Selama masih berlaku
4	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2025	-	-	√	Selama masih berlaku
5.	Rekapitulasi Nota Kesepahaman dengan K/L Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama DalamNegeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2025	-	-	√	Selama masih berlaku

6.	Rekapitulasi Asistensi Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Instansi Penegak Hukum	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2025	-	-	√	Selama masih berlaku
7.	Rekapitulasi Pemantauan Kemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan di Bidang TPPU dan TPPT	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2025	-	-	√	Selama masih berlaku
8	Dokumen Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, termasuk dokumen Rencana Aksi	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2025	√	-	√	Selama masih berlaku

Lingkup Pelaporan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Buletin Statistik Bulanan	Direktorat Pelaporan	Direktorat Pelaporan	Jakarta, Bulanan	-	-	√	Permanen
2.	Laporan Financial Integrity Rating Nasional yang Telah Disanitasi	Direktorat Pelaporan	Direktorat Pelaporan	Jakarta, 2020-2023	√	-	√	2 tahun setelah diregistrasi

Lingkup Pemberdayaan dan Kemitraan APUPPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Dokumen Perpustakaan (Katalog, Buku Induk, SOP)	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
2.	Laporan Semester	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, Tahunan	√	-	√	Permanen

3.	Laporan Tahunan	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, Semesteran	√	-	√	Permanen
4.	Dokumen Terkait Jurnal AML CFT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
5.	Maklumat Pelayanan di Lingkungan PPATK	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
6.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, semesteran	-	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
7	Laporan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun 2025	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Jakarta, 2025	√	-	√	Permanen

8	Nota Kesepahaman Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tentang Kerja Sama Bidang Perpustakaan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Jakarta, 2024	-	-	√	4 tahun
9	Nota Kesepahaman Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Universitas Gunadarma Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Jakarta, 2025	-	-	√	5 tahun
10	Nota Kesepahaman Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Universitas Katolik Indonesia Atma	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan	Jakarta, 2025	-	-	√	5 tahun

	Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.	Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Pendanaan Terorisme (APUPPT)					
11	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Association Of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE) Tentang Pengembangan Jurnal Ilmiah Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Jakarta, 2024	-	-	√	4 tahun

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Statistik Jumlah Pelaksanaan Audit	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih Berlaku
2.	Statistik Rekomendasi Sanksi/Sanksi kepada Pihak Pelapor (Hanya Meliputi Jumlah Pihak Pelapor, Jenis Industri, Jenis Sanksi yang Diberikan)	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih Berlaku

3.	Statistik Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Asistensi (Hanya Meliputi Jumlah Pihak Pelapor, Jenis Industri, Jenis Kegiatan, dan Lokasi Kegiatan)	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih berlaku

Lingkup Hukum dan Regulasi

No.	**Ringkasan Isi Informasi**	**Unit Kerja Penguasa Informasi**	**Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi**	**Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi**	**Bentuk Informasi yang Tersedia**			**Jangka Waktu Penyimpanan**
					Cetak	**Rekam**	**Digital**	
1.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun

2.	Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
3.	Surat Edaran Kepala PPATK Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
4.	Statistik Jumlah Pengunjung Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Eksternal	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
5.	Putusan Judicial Review dan Hak Uji Materi atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
6.	Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun

	dan tindak pidana pendanaan terorisme terpublikasi							

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA